

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

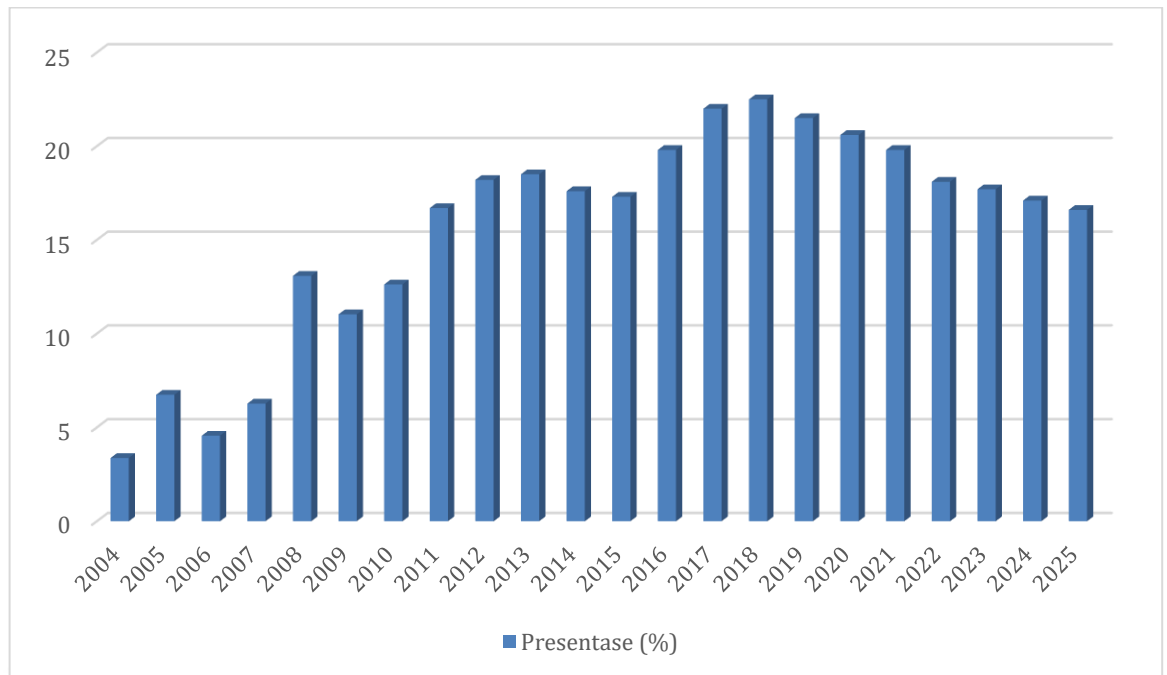
Kelompok masyarakat kelas menengah mempunyai pengaruh besar terhadap dinamika perekonomian. Tingkat konsumsi yang relatif konsisten bisa menjaga pergerakan permintaan barang dan jasa sambil mendukung aktivitas ekonomi nasional. Stabilitas finansialnya yang lebih baik membuat kelompok ini mempunyai kapasitas belanja yang berkelanjutan apalagi kontribusi konsumsi dari kelas menengah dan kelompok yang sedang menuju kelas menengah menjadi sumber utama dalam pembentukan konsumsi domestik jangka panjang. (BPS, 2025)

Kehadiran kelas menengah membantu mendorong pendapatan pemerintah lewat kontribusi pajak yang lebih luas, alhasil memudahkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, kemudian populasi kelas menengah yang besar sering dianggap sebagai tanda meningkatnya standar hidup dan ekonomi yang bergerak menuju keadaan yang lebih maju. (OECD, 2019). Alasannya ialah karena orang-orang kelas menengah dianggap mempunyai daya beli yang cukup tinggi, kebiasaan belanja yang lebih teratur, dan cenderung mengalokasikan sumber daya ke hal-hal yang mendorong kualitas hidup mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Mempunyai kelas menengah yang besar seringkali berhubungan dengan manajemen institusi yang lebih baik dan kebijakan publik yang bisa menjangkau lebih banyak orang, karena perubahan komposisi kelas menengah memengaruhi ekonomi, masyarakat dan arah politik suatu negara

Tapi di perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir mencuat isu *middle class squeeze* yang mulai menjadi perhatian di banyak negara dikarenakan kelompok kelas menengah menghadapi tekanan yang makin rumit mulai dari ketidakmerataan pendapatannya, lalu perubahan pola pekerjaannya dan melemahnya kecakapannya mempertahankan tingkat kesejahteraan akibat

kondisi ekonomi yang terus berubah. (OECD, 2019). Itulah yang jadi indikasi bahwasanya biaya hidup mengalami peningkatan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat. Di sisi lainnya, globalisasi dan inovasi teknologi memegang peran dalam menghadirkan jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa tersedia di pasar tenaga kerja kepada masyarakat. Persoalan mulai berdatangan dimana saat perekonomian bertumbuh tanpa diikuti oleh naiknya lapangan kerja dan tanpa naiknya upah itu jadi jaminannya kelas menengah. Ada faktor lainnya misalnya distribusi pendapatannya dan kualitas pekerjaannya yang jadi elemen utama yang bisa memberi efek kepada stabilitasnya kelas menengah. Fenomena *middle class squeeze* bisa menjadi salah satu penyebab dari berbagai permasalahan sosial karena mempunyai keterkaitan yang kuat terhadap berbagai isu sosial yang terjadi.

Di Indonesia kelas menengah tak selalu tumbuh secara stabil karena mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak awal tahun 2000-an, tapi belakangan ini justru mencerminkan tren stagnasi bahkan penurunan. Menurut data dari BPS diperlihatkan kalau kelas menengah di Indonesia meningkat dari 16,7% pada 2011 menjadi sekitar 22,5% pada 2018. Tapi angkanya turun lagi menjadi 17,10% pada 2024. (BPS, 2025). Penurunan di sini mencerminkan berbagai tekanan ekonomi yang membuat orang sulit mempertahankan atau naik ke kelas sosial tertentu. Fluktuasi naik turun mencerminkan bahwasanya kelas menengah Indonesia belum stabil dan masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Ini berarti beberapa orang yang sebelumnya termasuk kelas menengah bisa saja masuk ke kelompok rentan karena hal-hal seperti inflasi atau penurunan pendapatan riil. Jadi intinya kelas menengah di Indonesia masih cukup lemah daya tahan ekonominya



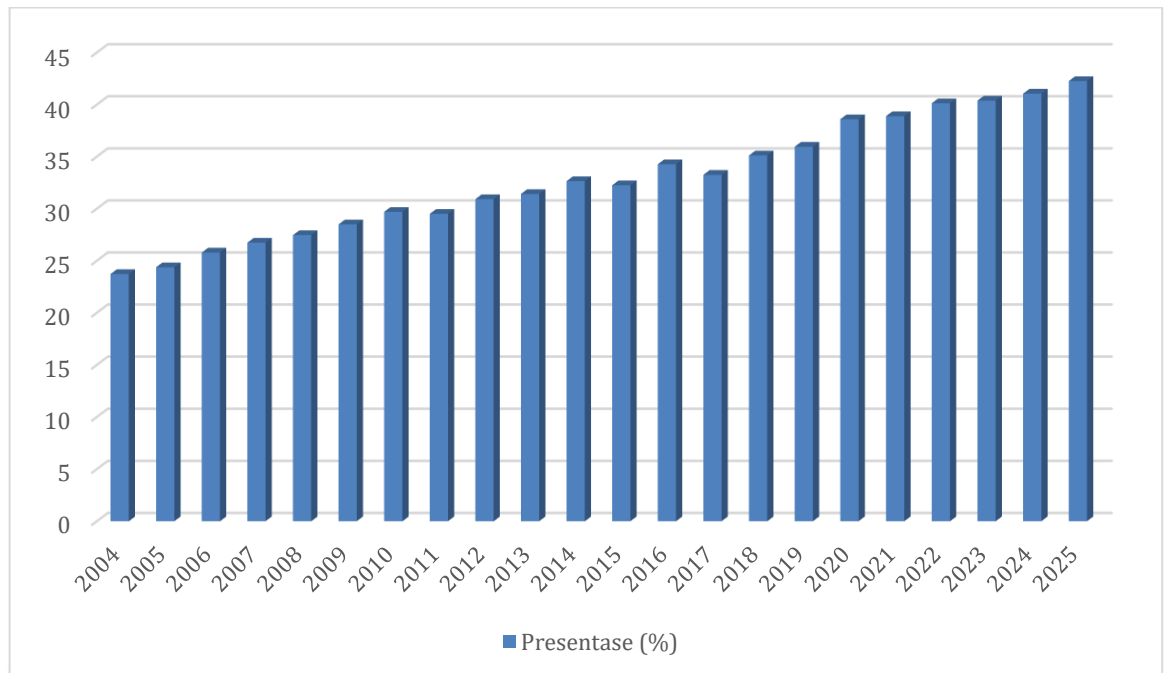
Gambar 1.1 Tren Populasi Kelas Menengah, 2004-2025

Sumber: Susenas BPS

Situasi saat ini mencerminkan bahwasanya tingkat kesejahteraan yang dinikmati orang nggak selalu selaras dengan perkembangan ekonomi. Dari sisi indikator ekonomi, Indonesia terkena tren pertumbuhan yang relatif stabil, tapi bila keuntungan ekonominya tidak dibagi secara merata, artinya tidak semua orang merasakannya. World Bank (2019) menjabarkan dimana sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam kategori kelas menengah yang bercita-cita, yang merupakan kelompok rentan yang bisa dengan mudah kembali ke kondisi ekonomi yang lebih rendah. Kelompok ini mempunyai tingkat konsumsi yang sedikit lebih baik di atas garis kemiskinan, tetapi situasi ekonomi mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Tandanya itulah mengapa mobilitas ekonomi menuju kelas menengah masih menghadapi banyak hambatan struktural. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan kondisi hidup yang layak masih menjadi masalah atau tantangan yang mempengaruhi daya tahan ekonomi masyarakat. Ketidakstabilan pendapatan, dikombinasikan dengan perlindungan

sosial yang tidak merata, bisa mendorong kerentanan terhadap penurunan kondisi hidup. Situasi ini mencerminkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang merata yang bisa menjangkau banyak kelompok merupakan fondasi yang kuat untuk mempertahankan keberadaan kelas menengah

Mengacu pada data kajiannya maka tingkat pendidikan di Indonesia mencerminkan tren yang meningkat secara bertahap selama periode 2004–2025. Indikator pendidikan, yang tercatat mencapai 23,72 pada tahun 2004, secara bertahap meningkat menjadi 30,76 pada tahun 2010, kemudian mencapai 39,87 pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 42,26 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang makin baik serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan bagi masyarakat. Secara teori, pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang bisa mendorong keterampilan, produktivitas, dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi. Jadi, mendorong tingkat pendidikan seharusnya idealnya mendorong kesejahteraan masyarakat dan mendorong peluang untuk bergabung dengan kelas menengah. Tapi walau pendidikan tumbuh cukup stabil selama periode penelitian, kelas menengah tidak selalu berkembang dengan laju yang sama yang memberi sebuah gambaran bahwasanya manfaat ekonomi dari pendidikan tidak terjadi secara instan, tapi manfaatnya dipengaruhi pula oleh hal-hal seperti seberapa baik pasar kerja bisa menyerap tenaga kerja terdidik, kualitas pekerjaan yang tersedia, dan pendapatan yang diperoleh orang sesuai menyelesaikan pendidikannya



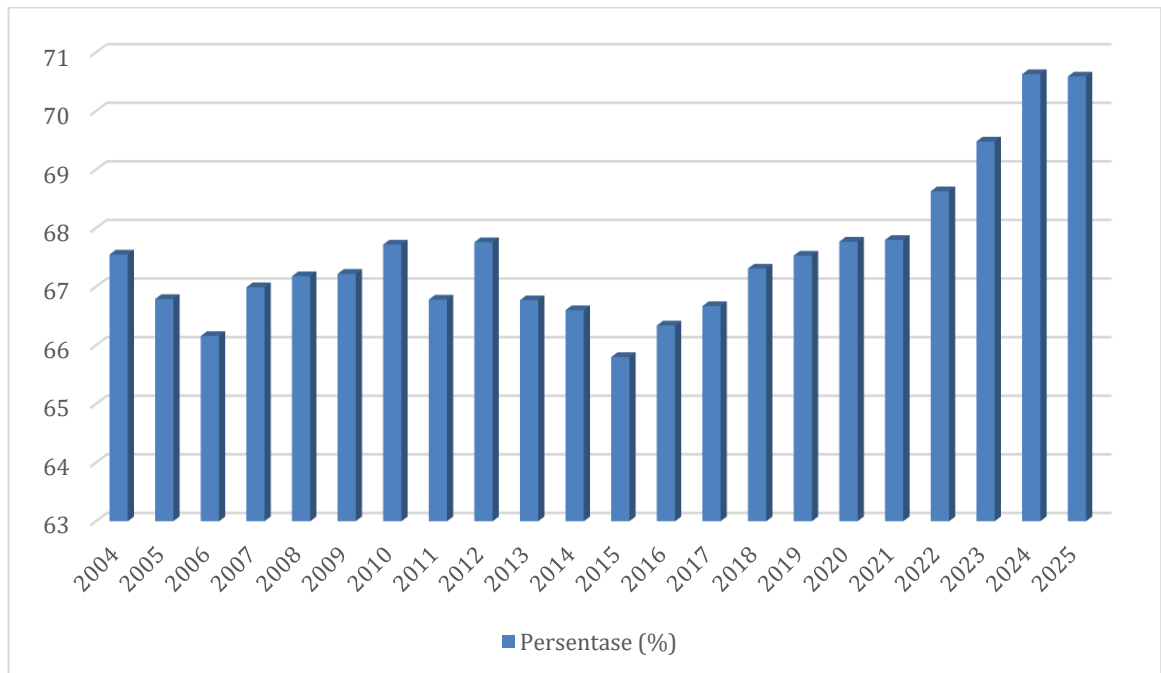
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk yang Menamatkan SMA/Sederajat ke Atas, 2005-2025

Sumber: Susenas BPS

Ketimpangannya diantara peningkatan jumlah lulusan pendidikan dengan kecakapan pasar kerja dalam menyediakan kesempatan kerja yang sesuai menjadi salah satu persoalan yang masih ditemui pada kelompok tenaga kerja terdidik. Pertambahan lulusan yang tak diiringi oleh adanya atau kesediaan pekerjaan yang selaras dengan kompetensi menjadikan beberapa orang harus menerima pekerjaan dengan level produktivitas rendah atau ada di luar bidang keahliannya dimana kondisi ini yang dikenal sebagai *mismatch* pendidikan dan dunia kerja. Sebagaimana dijabarkan oleh Rasch (2017) pendidikan yang lebih tinggi belum tentu mampu mendongkrak posisi ekonomi seseorang menuju kelas menengah bilamana tak didukung oleh kondisi pasar kerja yang mampu menyediakan peluang sesuai kompetensi yang dipunyai, mencerminkan dimana kenaikan kualitas pendidikan sangat-sangat diperlukan guna bisa memberi penyediaan lapangan kerja yang baik sebab ketaksesuaiannya diantara

kebutuhan tenaga kerjanya dan sistem pendidikannya ini bisa memberi batasan pada peluang orang guna mendapat kebermanfaatan perekonomian lebih baik.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk usia produktif, tetapi oleh jauh tidaknya mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di dalam hal ini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikator yang bisa menggambarkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Mengacu pada kajiannya TPAK Indonesia memperlihatkan sebuah perkembangan yang relatif positif selama periode 2004–2025 dimana di 2004 TPAK tercatat sampai 67,55 persen dan lalu gerak dengan fluktuatif sebelum akhirnya bisa sampai ke titik 70,59 persen di 2025 dimana itu menjadi indikasi dimana makin banyak penduduk usia produktifnya yang berusaha untuk masuk, mendobrak dan ikutserta pada sebuah kegiatan perekonomian. Mengacu pada cerminan atau pandangannya pembangunan maka kondisi ini menjadi sebuah potensi yang bisa dimaksimalkan guna menyokong pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan produksi, konsumsi, dan pendapatan masyarakat. Walau begitupun tingginya partisipasi angkatan kerja tak selamanya bisa selaras atau berbanding lurus dengan naiknya level kesejahteraannya warga. Kenyataannya atau realitas pasar kerja di negara ini masih mencerminkan dimana kebanyakan darinya masih kerja pada sektor informal dimana level keproduktivitasan dan pendapatannya masih jauh dari kata layak, yang menjadikan kuantitas dari penduduk yang bekerja belum tentu bisa mendongkrak posisi ekonomi rumah tangganya dengan berarti.



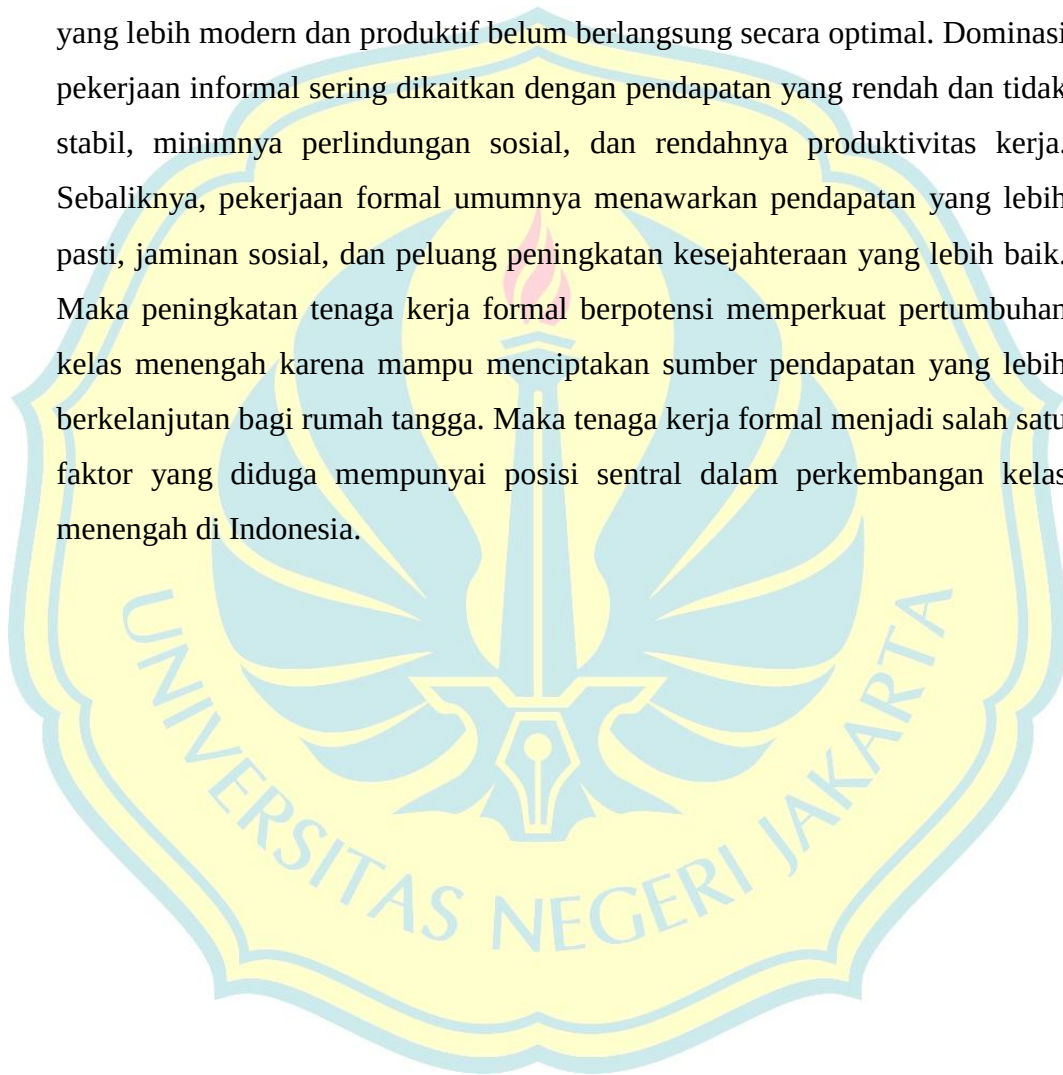
Gambar 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2004-2025

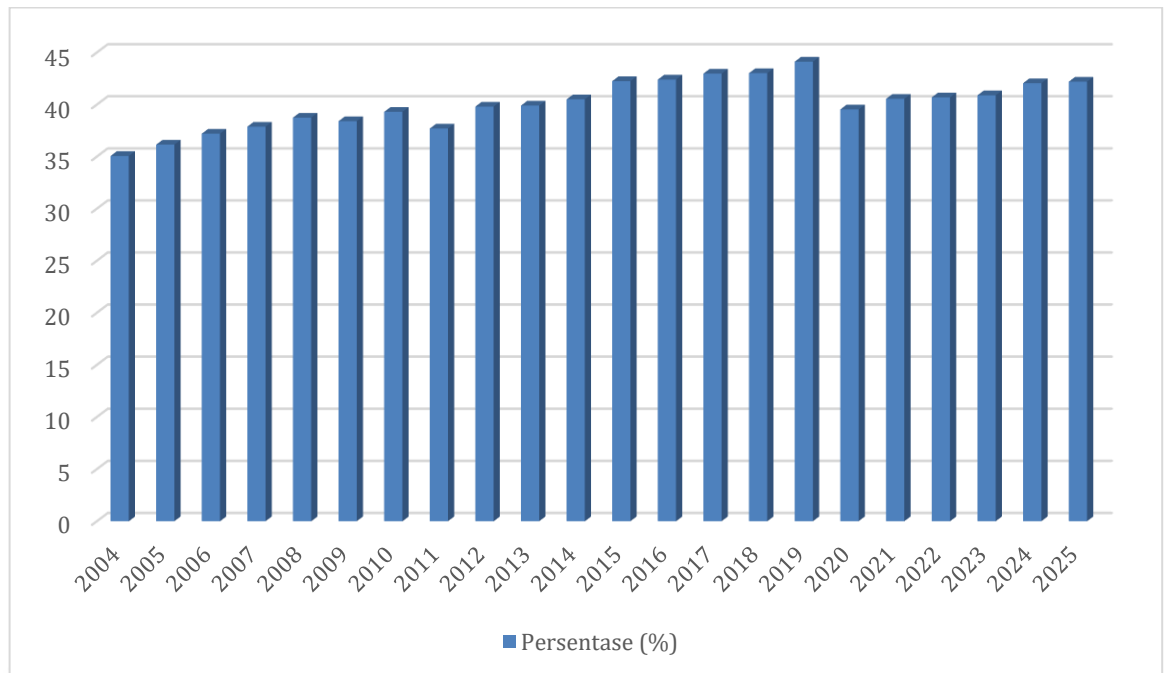
Sumber: Sakernas BPS

Peningkatan partisipasi angkatan kerja belum tentu mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan. Banyak tenaga kerja yang terserap dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak stabil. Itu mempunyai kaitan dengan struktur ketenagakerjaan karena tenaga kerja formal yang dianggap mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dan mempunyai pendapatan yang relatif lebih stabil diperbandingkan sektor informal. Formalitas pada dasarnya bisa memberi jaminan pendapatan, jaminan sosial, dan jalur yang jelas tanpa ambiguitas untuk kemajuan karier. Sebaliknya, ketidakpastian pendapatan umum terjadi di sektor informal, dan mereka menerima perlindungan paling minim sebagai pekerja, disertai tingkat produktivitas kerja yang rendah. Keadaan seperti ini tentunya akan mempersulit peluang bagi sebagian besar pekerja di sektor informal untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang stabil.

Perkembangan tenaga kerja formal di Indonesia mencerminkan kecenderungan meningkat selama periode 2004–2025, dari 35,06 persen pada

tahun 2004 menjadi 42,20 persen pada tahun 2025. Meskipun sempat menurun pada masa pandemi COVID-19, proporsi tenaga kerja formal kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional. Kenaikannya mencerminkan adanya perbaikan dalam struktur ketenagakerjaan, tapi mencerminkan bahwasanya sebagian besar pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi ini mengindikasikan bahwasanya transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih modern dan produktif belum berlangsung secara optimal. Dominasi pekerjaan informal sering dikaitkan dengan pendapatan yang rendah dan tidak stabil, minimnya perlindungan sosial, dan rendahnya produktivitas kerja. Sebaliknya, pekerjaan formal umumnya menawarkan pendapatan yang lebih pasti, jaminan sosial, dan peluang peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Maka peningkatan tenaga kerja formal berpotensi memperkuat pertumbuhan kelas menengah karena mampu menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi rumah tangga. Maka tenaga kerja formal menjadi salah satu faktor yang diduga mempunyai posisi sentral dalam perkembangan kelas menengah di Indonesia.





Gambar 1.4 Persentase Tenaga Kerja Formal, 2004-2025

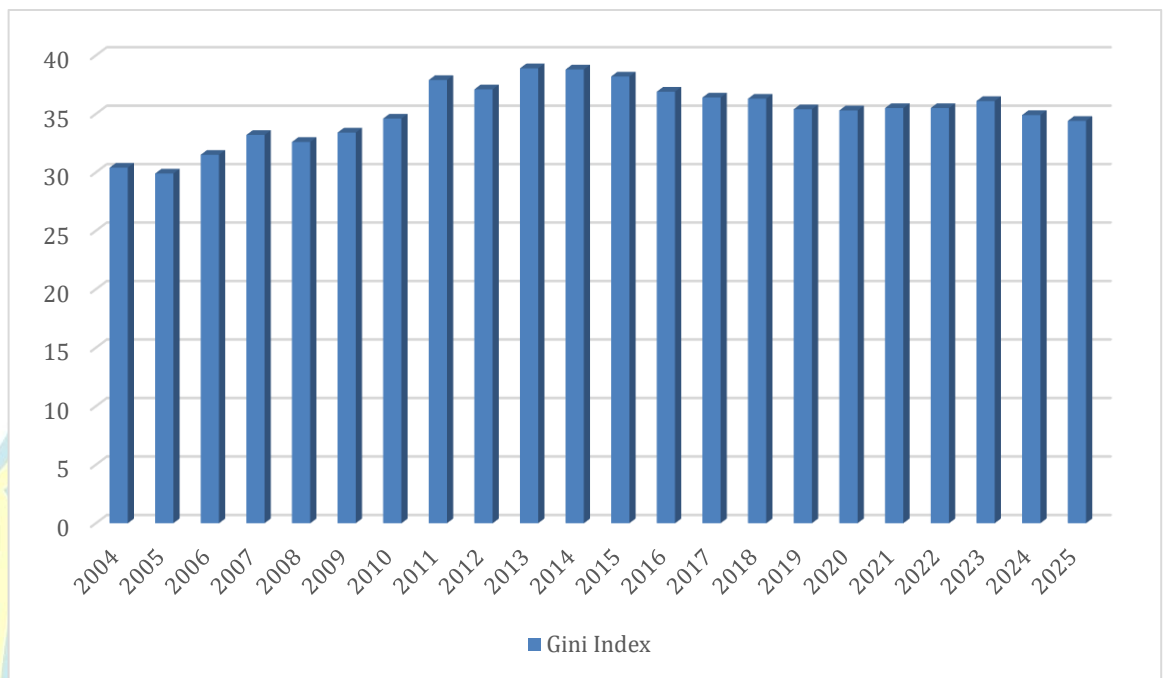
Sumber: Sakernas BPS

Menurut ILO (2021) dan Loayza & Rigolini (2011), Sektor informal yang mendominasi struktur ketenagakerjaan bisa menjadi penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pekerjaan informal cenderung mempunyai pendapatan rendah, produktivitas rendah, dan minim perlindungan sosial. Kondisi ini menyebabkan pekerja informal lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi atau penurunan permintaan pasar. Pekerja di sektor informal pada dasarnya menjadi kelompok yang rentan akibat keterbatasan perlindungan sosial karena tidak mempunyai akses terhadap jaminan sosial dari tempat mereka bekerja seperti asuransi kesehatan dan pensiun. Itu membuat tingkat keamanan ekonomi mereka menjadi lebih rendah diperbandingkan pekerja formal. Stabilitas pendapatan yang rendah membatasi kapasitas rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi. Maka peluang untuk naik ke kategori kelas menengah yang dimulai dari kategori yang lebih rendah menjadi makin kecil. Dan ini merupakan salah satu hambatan dalam upaya menciptakan pertumbuhan kelas menengah yang berkelanjutan.

Kelas menengah Indonesia mempunyai posisi sentral untuk menyeimbangkan stabilitas sosial dan ekonomi. Kelas menengah yang besar dikaitkan dengan stabilitas sosial, partisipasi politik, dan kualitas institusi di negara tersebut (Easterly, 2001). Kelas menengah mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam stabilitas ekonomi dan kebijakan yang dampaknya lebih menyebar secara luas. Struktur populasi kelas menengah di Indonesia masih dinilai rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi. Banyak rumah tangga berada di ambang batas antara kelompok menengah dan kelompok rentan miskin. Kondisi mereka yang masih cukup rentan ini menjadi penyebab terjadinya fenomena middle-class squeeze ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau penurunan pendapatan riil.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk melihat jauh tidaknya hasil pembangunan ekonomi bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di pada kajian ini, tingkat ketimpangan diukur memakai Indeks Gini yang mencerminkan distribusi pendapatan antarpenduduk. Berdasarkan data penelitian, Indeks Gini Indonesia mencerminkan tren menurun dalam jangka panjang, dari 38,9 pada tahun 2013 yang merupakan tingkat tertinggi selama periode penelitian menjadi 34,4 pada tahun 2025. Penurunannya mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat, yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan upaya pemerataan pembangunan. Walau begitu, tingkat ketimpangan yang masih berada di atas angka 30 mencerminkan bahwasanya distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwasanya manfaat pertumbuhan ekonomi masih cenderung dinikmati lebih besar oleh kelompok masyarakat tertentu diperbandingkan kelompok lainnya. Ketimpangan yang relatif tinggi bisa membatasi akses sebagian masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan berbagai peluang ekonomi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan yang menjadikan mobilitas sosial menjadi lebih terbatas dan proses pembentukan kelas menengah bisa berjalan lebih lambat.

Maka tingkat ketimpangan pendapatan menjadi faktor yang penting untuk dianalisis karena bisa memengaruhi kecakapan masyarakat dalam mendorong status ekonomi dan memperluas kelompok kelas menengah di Indonesia (World Bank, 2024).



Gambar 1.5 Ketimpangan Pendapatan, 2004-2025

Sumber: World Bank

Tingkat ketimpangan yang besar memberi sebuah gambaran bahwasanya manfaat pembangunan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu menjadikan kesempatan masyarakat guna mendorong taraf hidup belum tersebar secara seimbang. Perbedaan akses ke pendidikannya, pekerjaan formalnya dan peluang ekonominya menyebabkan sebagian rumah tangga mengalami hambatan dalam memperbaiki kondisi kesejahteraannya. Ketidakmerataan kesempatannya bisa melambatkan penyusunan pembentukan kelas menengah karena kecakapan masyarakat dalam memperoleh sumber daya ekonomi menjadi terbatas. Kajian ini memandang ketimpangan dari sisi pendapatan dan perpindahan status sosial dikarenakan keterbatasan akses bagi kelompok dengan penghasilan rendah bisa memberi hambatan mobilitas

ekonomi serta mendongkrak kerentanan perekonomian ketika menghadapi tekanan atau gangguan

Banyak penelitian sebelumnya telah dilaksanakan mengenai pengaruh pendidikan, pekerjaan dan ketimpangan terhadap masyarakat. Sejumlah studi telah menjabarkan hubungan faktor-faktornya dan bagaimana faktor-faktornya bisa menentukan perekonomian suatu negara. Wai-Poi et al. (2019) menjabarkan prevalensi populasi kelas menengah sangat ditentukan pada struktur pekerjaan dan peluang yang mereka dapatkan. Karakteristik sebuah pekerjaan jadi salah satu aspek yang memberi pengaruh posisi ekonomi seseorang karena jenis pekerjaannya, lalu tingkat pendapatannya sampai kestabilan kerja berkaitan erat dengan kecakapan memenuhi kebutuhan hidup. Kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai dan akses terhadap pekerjaan yang berkualitas turut membuka peluang bagi masyarakat untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Keterkaitan antara sistem pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan menjadi melemah tanpa adanya pekerjaan yang sepadan dengan produktivitas. Hubungan antara pendidikan, ketenagakerjaan, dan kelas menengah bersifat saling terkait.

Maipita dan Wahyudi (2017) menjabarkan dimana ketika distribusi pendapatan tidak merata pola konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bisa terpengaruh. Ketimpangan yang tinggi menjadi permasalahan karena pertanda bahwasanya sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok atas. Itu akan berdampak pada terbatasnya daya beli masyarakat di kelompok menengah dan bawah. Lalu, pola konsumsi yang tidak merata bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konsumsi domestik yang menjadi salah penopang utama pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Kondisi ini akan memberi dampak pada stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Ketimpangan pendapatan yang terlampau tinggi bisa memperbesar risiko ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Menurut Egawa (2013) ketimpangan pendapatan yang meningkat merupakan sebuah halangan bagi mobilitas ekonomi dan sekaligus menghambat pertumbuhan kelas menengah terutama di negara-negara berkembang. Dimana individu dari kelompok kelas bawah yang sebelumnya sudah bekerja tetap berada pada posisi ekonomi yang sama karena peluang ekonomi yang makin sempit dan justru mendapati diri mereka makin kurang beruntung dalam hal daya beli relatif ketika tidak didorong untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka sendiri. Fenomena ini memberi pemahaman bahwasanya ketimpangan tidak hanya terdapat dalam distribusi pendapatan melainkan implikasi dengan berbagai persoalan sosial ekonomi lainnya. Bahkan ketimpangan bisa menjadi salah satu penyebab utama mengapa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berhasil dalam membuat masyarakat lebih sejahtera.

Kelas menengah yang sehat dibangun di atas sektor formal yang menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan (Maloney, 2004). Jenis pekerjaan di sektor formal biasanya pekerja bisa bekerja dengan mendapatkan kepastian kerja yang lebih stabil, upah yang lebih tinggi dan perlindungan sosial. Itu memungkinkan pekerja mempunyai kestabilan pendapatan sehingga bisa membuat proyeksi terhadap masa depan mereka. Mereka akan mendapati peluang yang lebih besar untuk mencapai stabilitas sehingga bisa untuk mengangkat mereka ke lapisan yang lebih tinggi. Lalu, layanan keuangan seperti kredit dan tabungan tersedia lebih banyak diakses oleh kelompok pekerja di sektor formal. Itu bisa menjadi pendorong konsumsi rumah tangga dan investasi yang lebih tinggi. Tapi, pendapatan belum dijamin dan stabilitas kerja rendah di sektor informal. Dari situ porsi pekerjaan formal dianggap sebagai proksi bagi kualitas struktur ketenagakerjaan suatu ekonomi.

Hanya beberapa dari studi yang ada yang memasukkan variabel seperti itu, tetapi biasanya mereka melaksanakannya secara terpisah pendidikan saja atau ketimpangan saja. Pendekatan yang parsial ini menyebabkan pemahaman terhadap dinamika kelas menengah menjadi kurang komprehensif. Padahal,

dalam kenyataannya, faktor-faktor ekonomi saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan secara sederhana. Lalu, penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, struktur ketenagakerjaan formal, dan ketimpangan pendapatan terhadap populasi kelas menengah di Indonesia masih terbatas. Ini menyoroti adanya celah dalam literatur yang menutupi detail-detail yang lebih luas. Tanpa analisis terintegrasi seperti itu, kita tidak bisa mengetahui faktor mana yang secara dominan mendorong kelas menengah.

Kajian terkait dengan kelas menengah masih mengaruhi keterbatasan karena beberapa penelitian belum memasukkan ukuran ketenagakerjaan yang lebih spesifik, misalnya proporsi pekerja formal yang berkesinambungan dengan kepastian penghasilan dan mutu pekerjaan. Maka kajiannya ini hadir guna menelaah keterkaitan struktur tenaga kerja ke perubahan kelas menengah di Indonesia karena penggunaan indikator umum belum sepenuhnya memberi gambaran keadaan pasar kerja yang sebenarnya. Persentase pekerja formal bisa jadi ukuran untuk melihat kecakapan ekonomi dalam menyediakan pekerjaan yang stabil dan berkesinambungan. Berbeda dari kajian sebelumnya yang banyak memakai regresi linier biasa, kajian ini akan memakai ECM guna mengamati dinamika hubungan variabel pada periode pendek maupun panjang

Lewat kajian ini diupayakan bisa memperoleh wawasan lebih dalam, lebih rinci terkait faktor yang memberi pengaruh perkembangan kelas menengah di Indonesia dan hubungannya, dikarenakan itu menjadi proses ekonomi yang tidak selalu terjadi secara langsung. Beberapa variabel bisa memberi dampak dalam jangka pendek, sementara variabel lainnya baru mencerminkan pengaruh dalam jangka panjang. Maka diperlukan pendekatan analisis yang mampu menjabarkan kedua hubungannya secara simultan. Pada kajian ini dipakai pendekatan ECM guna menganalisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tenaga kerja formal, dan indeks gini terhadap kelas menengah di Indonesia. Dinamika kelas menengah yang cenderung fluktuatif mencerminkan adanya permasalahan

struktural dalam perekonomian. Dengan mengkaji peran pendidikan, partisipasi angkatan kerja, struktur ketenagakerjaan formal, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini diharapkan jadi salah satu sumber memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kondisi dari kelas menengah di Indonesia pada saat ini. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hubungan antarvariabel yang lebih jelas dan terukur. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempunyai posisi sentral dalam pembentukan kelas menengah.

1.2 Rumusan Masalah / Pertanyaan Penelitian

Perkembangan kelas menengah di Indonesia masih belum berada di kondisi yang sepenuhnya stabil karena meskipun terdapat beberapa indikator yang mencerminkan peningkatan yang cukup baik. Itu mengindikasikan bahwasanya pembentukan kelas menengah ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung tertentu. Beberapa variabel perlu diuji pengaruhnya terhadap populasi kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan halnya rumusan masalah pada kajian ini ialah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap populasi kelas menengah di Indonesia?
2. Apakah partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap populasi kelas menengah di Indonesia?
3. Apakah persentase tenaga kerja formal berpengaruh positif terhadap populasi kelas menengah di Indonesia?
4. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap populasi kelas menengah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor ekonomi terhadap populasi kelas menengah di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh positif pendidikan terhadap populasi kelas menengah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menganalisis pengaruh positif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kelas menengah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menganalisis pengaruh positif persentase tenaga kerja formal terhadap populasi kelas menengah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Menganalisis pengaruh negatif ketimpangan pendapatan terhadap populasi kelas menengah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

Hasil dari kajian ini diupayakan bisa memberi sedikit sumbangsih ke pengembangan pengetahuan dari sektor perekonomian pembangunan secara berkelanjutan, itu dikarenakan kajiannya ini menyatukan variabel pendidikan, kemudian partisipasi angkatan kerja, hingga struktur pekerjaan formal, sampai ketimpangan pendapatan ke dalam satu kerangka analitis yang bisa memperluas literatur terkait dengan menyokong kelas menengah. Kajian ini diupayakan bisa menguatkan bukti empiris teruntuk teori yang menjabarkan kualitasnya SDM, kemudian struktur pasar tenaga kerja sampai distribusi pendapatan mengarah pada kesejahteraan terkait dengan masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif dan efektif. Penelitian ini sedikit memberi masukan terkait dengan betapa pentingnya peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja lewat perluasan sektor formal. Di sisi lain, penelitian ini menekankan pentingnya upaya pengurangan ketimpangan pendapatan guna memperkuat daya tahan kelas menengah dan mendongkrak mobilitas. Maka hasilnya kajian ini diupayakan bisa memberi sumbangsih ini guna mendorong tersusunnya perekonomian yang lebih inklusif.

